



## Migrasi dan Pembentukan Komunitas: Dinamika Sosial Nelayan Migran Buton di Pulau Derawan

Ichwanul Jaya<sup>1\*</sup>, Mungsi Lampe<sup>1</sup>, Suparman Abdullah<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Department of Anthropology, Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University, Indonesia

\*Corresponding Author's e-mail: Ichwanuljaya@gmail.com

### Article History:

Received: July 25, 2025

Revised: August 10, 2025

Accepted: August 11, 2025

### Keywords:

mobilitas internal, relasi etnis, adaptasi sosial, ketahanan komunitas, batas simbolik, ruang pesisir

**Abstract:** Internal migration among coastal communities is often viewed purely through an economic lens. In contrast, in reality, it involves complex social, cultural, and institutional dimensions that shape the formation of migrant communities. The Butonese fishing community on Derawan Island, Berau Regency, exemplifies how migration creates new social spaces rich in meaning, identity negotiation, and structural tensions. This study analyzes the migration process of Butonese fishers to Derawan Island. It explores how they establish a new community through social adaptation and the reproduction of cultural values, while also identifying structural challenges in integrating with local systems. Using a qualitative ethnographic approach through participant observation, in-depth interviews, and oral history documentation across five coastal villages, the study draws on Pierre Bourdieu's theory of cultural capital, Fredrik Barth's theory of ethnic boundaries, and Henri Lefebvre's theory of the production of space. Findings indicate that migration occurred gradually through social networks, driven by ecological pressures, cultural values surrounding migration, and the desire to build a more stable livelihood. The Butonese community reproduces its social structure through collective labor, informal authority, and the creation of symbolic spaces known as the "Buton Group." Despite achieving internal cohesion, they continue to face structural obstacles, including limited access to land legality, administrative recognition, and formal empowerment programs. This research underscores the need to understand coastal migration not merely as an economic or demographic movement, but as a socially embedded process involving identity, power, and spatial transformation.

Copyright © 2025, The Author(s).

This is an open access article under the CC-BY-SA license



**How to cite:** Jaya, I., Lampe, M., & Abdullah, S. (2025). Migrasi dan Pembentukan Komunitas: Dinamika Sosial Nelayan Migran Buton di Pulau Derawan. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 4(8), 1148–1161. <https://doi.org/10.55681/sentri.v4i8.4347>

## PENDAHULUAN

Migrasi telah menjadi strategi historis dan kultural yang menandai dinamika kehidupan masyarakat Buton selama berabad-abad. Sebagai kelompok masyarakat maritim, orang Buton memiliki tradisi pelayaran dan perantauan yang kuat, tidak hanya untuk berdagang dan mencari penghidupan, tetapi juga sebagai bentuk ekspansi sosial-budaya yang menyatu dalam identitas kolektif mereka (Pelras, 2000; Kusnaka, 2010). Di tengah keterbatasan sumber daya agraris Pulau Buton, migrasi menjadi pilihan rasional sekaligus simbolik untuk memperluas ruang hidup, memperkuat jaringan sosial, dan mempertahankan harga diri sebagai masyarakat pelaut. Budaya merantau dalam masyarakat Buton tidak dipandang sebagai keterpaksaan, melainkan sebagai bagian dari siklus kehidupan yang mengandung dimensi ekonomi, politik, dan spiritual (Acciaioli, 2001; Arifin, 2017).

Salah satu wilayah yang menjadi tujuan migrasi nelayan Buton adalah Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Kawasan ini dikenal sebagai salah satu wilayah pesisir dengan potensi sumber daya laut yang tinggi, mulai dari ikan pelagis, demersal, hingga hasil laut bernilai tinggi seperti lobster dan teripang. Sejak dekade 1980-an, kawasan ini mulai menarik perhatian nelayan dari luar daerah, termasuk Buton, sebagai lokasi baru untuk membangun kehidupan. Gelombang migrasi ini berlangsung secara bertahap dan bersifat organik, bukan programatis. Pola migrasi yang terjadi didorong oleh jejaring sosial berbasis keluarga, kolega, atau teman satu daerah, yang terlebih dahulu melakukan “eksplorasi sosial” dan kemudian membuka jalan bagi migran baru (Hugo, 1995; Adhuri, 2013).

Dalam beberapa dekade, migrasi ini berkembang dari pola perantauan individual menjadi formasi komunitas yang lebih stabil dan berakar, membentuk unit-unit pemukiman yang mereproduksi struktur sosial, nilai-nilai budaya, dan pola ekonomi khas Buton. Komunitas-komunitas ini tidak hanya meniru struktur asalnya, tetapi juga mengalami proses adaptasi dan negosiasi dengan lingkungan baru. Dengan membawa nilai seperti padoma (kerja bersama), binci-binciki kuli (harmoni sosial), dan sistem kerja punggawa-sawi, komunitas ini berusaha membangun kohesi internal sekaligus membuka ruang interaksi dengan masyarakat lokal. Migrasi di sini tidak sekadar perpindahan fisik, tetapi juga proses pembentukan ruang sosial baru dengan norma, identitas, dan dinamika kekuasaan yang khas (Cohen, 2000; Barth, 1969).

Namun demikian, pembentukan komunitas migran nelayan tidak terjadi dalam ruang sosial yang netral. Komunitas migran selalu berada dalam medan tarik-menarik antara nilai asal dan struktur lokal. Di satu sisi, nelayan Buton berusaha mempertahankan prinsip hidup mereka melalui mekanisme kerja kolektif dan solidaritas etnis. Di sisi lain, mereka harus menghadapi kenyataan baru: konflik akses tangkap, struktur birokrasi lokal yang tidak selalu inklusif, dan kompetisi dengan komunitas nelayan lain yang lebih dahulu mapan. Adaptasi menjadi kebutuhan vital dalam proses pembentukan komunitas tersebut, tidak hanya dalam aspek teknis melaut, tetapi juga dalam hal sosial, budaya, dan politik lokal (Griffith, 2009; Fabinyi et al., 2014).

Sayangnya, studi mengenai migrasi nelayan di Indonesia masih cenderung menekankan aspek ekonomi, seperti pergerakan tenaga kerja atau pengaruh sumber daya alam terhadap migrasi, dan belum secara memadai mengeksplorasi dinamika pembentukan komunitas etnis dan bagaimana nilai-nilai budaya dinegosiasikan dalam ruang-ruang baru (Adhuri & Rachmawati, 2019; Eder, 2009). Padahal, dalam konteks masyarakat pesisir yang semakin plural dan kompleks, hubungan antar kelompok etnis, serta dinamika integrasi dan segregasi sosial memainkan peran penting dalam membentuk ekologi sosial pesisir kontemporer.

Tulisan ini berusaha menjelaskan dinamika migrasi nelayan Buton ke Pulau Derawan secara historis, sosiologis, dan kultural. Fokus utama diarahkan pada bagaimana komunitas ini terbentuk, nilai-nilai apa yang mereka bawa, bagaimana nilai tersebut ditransformasi atau dinegosiasikan, serta sejauh mana pola migrasi ini menciptakan fondasi bagi munculnya komunitas etnis nelayan yang khas. Analisis ini menjadi penting tidak hanya untuk memahami formasi sosial nelayan migran, tetapi juga untuk menjelaskan konfigurasi kekuasaan, identitas, dan adaptasi yang mereka alami dalam ruang sosial yang terus berubah.

## LANDASAN TEORI

Analisis terhadap dinamika migrasi dan pembentukan komunitas nelayan Buton di Pulau Derawan membutuhkan pemahaman teoritis yang tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi mampu menjelaskan proses sosial yang berlangsung dalam konteks sejarah, relasi kuasa, dan produksi ruang. Dalam konteks ini, terdapat empat pendekatan utama yang digunakan, yaitu: teori migrasi internal, teori pembentukan komunitas etnis, dan konsep modal budaya dan ruang sosial, serta konsep produksi ruang dari Henri Lefebvre.

Teori migrasi internal menjelaskan mobilitas penduduk dalam satu negara akibat tekanan struktural atau dorongan peluang di wilayah lain. Dalam kasus nelayan Buton, migrasi bukan semata respons terhadap krisis ekologis atau ekonomi di daerah asal, tetapi juga bagian dari pola historis migrasi etnis yang dipengaruhi oleh nilai budaya merantau dan jejaring sosial antarwilayah. Menurut Lee (1966), migrasi dipengaruhi oleh faktor pendorong (push factors) dan penarik (pull factors), serta kondisi perantara (intervening obstacles) yang membentuk keputusan migrasi dan proses penempatan ulang. Namun, migrasi nelayan tidak dapat direduksi menjadi tindakan individual berbasis kalkulasi ekonomi semata. Dalam tradisi migran pelaut seperti Buton, migrasi adalah bagian dari proyek kolektif, bersifat generasional, dan mengandung muatan simbolik. Oleh karena itu, pendekatan migrasi yang digunakan dalam studi ini menekankan pentingnya melihat migrasi sebagai proses historis dan sosial, bukan sekadar mobilitas geografis.

Setelah migrasi terjadi, pembentukan komunitas menjadi proses penting yang menentukan keberlangsungan kelompok dalam ruang baru. Menurut Cohen (1985), komunitas etnis terbentuk melalui penciptaan batas-batas simbolik (symbolic boundaries), baik melalui bahasa, adat, religi, maupun praktik sosial yang membedakan kelompok dari masyarakat sekitar. Dalam konteks migrasi nelayan Buton, pembentukan komunitas berlangsung melalui penguatan relasi asal daerah, sistem kekerabatan, serta reproduksi nilai-nilai kultural seperti binci-binciki kuli. Komunitas etnis migran tidak bersifat statis, melainkan terus dinegosiasikan dalam interaksi dengan kelompok lain dan dengan struktur lokal. Menurut Barth (1969), identitas etnis terbentuk bukan dari substansi budaya, melainkan dari batas-batas sosial yang dikelola dalam interaksi. Oleh karena itu, pembentukan komunitas nelayan Buton dapat dibaca sebagai upaya menciptakan “ruang aman” dalam lingkungan baru, baik secara sosial, ekonomi, maupun kultural, tanpa menutup kemungkinan terjadinya integrasi atau transformasi identitas.

Untuk memahami bagaimana komunitas nelayan Buton membentuk dirinya dalam konteks lokal, konsep modal budaya dan ruang sosial dari Pierre Bourdieu (1986) digunakan sebagai pisau analisis. Modal budaya merujuk pada seperangkat nilai, pengetahuan, keterampilan, dan simbol yang dibawa oleh individu atau kelompok dari latar belakang asalnya. Dalam kasus nelayan Buton, modal budaya mencakup pengetahuan melaut, sistem nilai kolektif, serta kemampuan membangun jaringan sosial berbasis kekerabatan dan kerja bersama. Konsep ruang sosial menjelaskan bahwa setiap komunitas menempati posisi dalam struktur sosial berdasarkan akumulasi modal yang mereka miliki, baik itu modal ekonomi, sosial, budaya, maupun simbolik. Komunitas migran seperti nelayan Buton harus menegosiasikan posisi mereka dalam ruang sosial baru, seringkali melalui proses trial and error dalam mengakses sumber daya, membangun legitimasi sosial, dan mempertahankan identitas kultural.

Untuk memperluas pemahaman atas bagaimana komunitas nelayan Buton menata kehidupan dalam lingkungan baru, konsep produksi ruang dari Henri Lefebvre (1991) menjadi pendekatan pelengkap yang penting. Lefebvre menekankan bahwa ruang

bukanlah wadah pasif yang netral, melainkan produk sosial yang dibentuk melalui praktik keseharian, relasi kekuasaan, dan proses simbolik. Dalam konteks migrasi pesisir, ruang seperti “Kelompok Buton” tidak hanya hadir sebagai tempat tinggal fisik, tetapi juga sebagai ruang simbolik yang diciptakan, dipertahankan, dan dinegosiasikan melalui aktivitas sosial, keagamaan, ekonomi, dan kultural komunitas migran. Dengan kata lain, ruang adalah hasil dari perjuangan sosial: untuk diakui, untuk memperoleh hak, dan untuk menjaga identitas. Komunitas Buton tidak hanya mengisi ruang yang tersedia, tetapi memproduksi ruang baru melalui tindakan-tindakan seperti pembangunan musala, pengajian kolektif, sistem kerja lokal, serta ritual budaya. Pemahaman ini memperkuat analisis bahwa ruang komunitas nelayan migran merupakan medan dinamis tempat identitas, kekuasaan, dan pengakuan sosial dipertaruhkan dan dinegosiasikan setiap hari.

Dengan menggabungkan keempat pendekatan tersebut, penelitian ini berupaya memahami proses migrasi dan pembentukan komunitas nelayan Buton secara lebih komprehensif: sebagai peristiwa historis, konstruksi sosial, praktik kultural, dan produksi ruang sosial yang berlangsung dalam medan relasi kuasa dan keterbatasan struktural.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan strategi studi kasus etnografis untuk memahami dinamika migrasi dan pembentukan komunitas nelayan Buton di Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menangkap praktik-praktik sosial yang dijalankan oleh para aktor, makna budaya yang melekat pada proses migrasi, serta kompleksitas relasi antarindividu dan antar komunitas dalam ruang sosial yang baru.

Lokasi penelitian difokuskan pada beberapa kampung di Kecamatan Pulau Derawan yang menjadi basis pemukiman komunitas nelayan Buton, seperti Pulau Derawan, Tanjung Batu, Teluk Semanting, Kasai dan Pegat Batumbuk. Lokasi ini dipilih karena memiliki sejarah migrasi yang cukup panjang dan memperlihatkan konsentrasi komunitas Buton yang signifikan baik dari sisi populasi maupun aktivitas ekonomi perikanan.

Informan dipilih secara purposif berdasarkan keterlibatan mereka dalam proses migrasi, pembentukan komunitas, dan kehidupan sosial nelayan Buton. Informan utama meliputi: nelayan generasi pertama (yang mengalami proses migrasi awal), nelayan generasi kedua atau ketiga (yang lahir dan besar di lokasi migrasi), tokoh adat dan pemuka agama dari komunitas Buton, pemimpin kelompok nelayan (misalnya ketua koperasi, punggawa, bos), aparat kampung dan tokoh masyarakat lokal (non-Buton), serta pihak lain seperti tengkulak, pedagang ikan, dan petugas UPT Dinas Perikanan. Jumlah informan utama sebanyak 25 orang, didukung dengan informan tambahan melalui snowball sampling.

Pengumpulan data dilakukan melalui pendekatan yang holistik dan mendalam, dengan menggabungkan wawancara, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi sebagai satu kesatuan metode yang saling melengkapi. Wawancara mendalam dilakukan untuk menggali narasi pribadi nelayan migran, tentang alasan mereka berpindah, bagaimana mereka beradaptasi di tempat baru, serta dinamika sosial yang mereka alami dalam proses membangun kehidupan dan jaringan komunitas. Untuk memahami realitas secara lebih kontekstual, peneliti turut serta dalam kehidupan sehari-hari para nelayan melalui observasi partisipatif. Seluruh temuan tersebut kemudian diperkuat melalui studi dokumentasi yang mencakup analisis terhadap dokumen resmi pemerintah kampung, arsip migrasi, catatan keluarga, peta permukiman, dan pemberitaan media lokal.

Analisis data dilakukan secara induktif dengan pendekatan tematik-kategorikal, dimulai dari transkripsi hasil wawancara dan observasi. Melalui koding terbuka, diidentifikasi tema-tema utama seperti motif migrasi, jaringan sosial, pembentukan komunitas, dan relasi etnis, yang kemudian dikembangkan melalui koding aksial untuk memahami hubungan antar tema. Interpretasi dilakukan dengan merujuk pada teori migrasi internal, komunitas etnis, dan modal budaya. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan narasi antar generasi, lokasi, dan sumber dokumentatif. Validitas dijaga melalui pencatatan harian lapangan, kutipan langsung dari informan, serta konfirmasi temuan kepada tokoh komunitas. Pendekatan ini memastikan analisis yang komprehensif, empatik, dan berakar pada realitas sosial yang dialami para nelayan migran.

Peneliti memiliki latar belakang sosial yang berbeda dari komunitas Buton, namun menjalin hubungan partisipatif melalui keterlibatan lapangan selama lebih dari dua bulan di lima lokasi kunci. Proses membangun kepercayaan (*trust building*) dilakukan melalui jaringan informal, partisipasi dalam kegiatan komunitas, serta keterbukaan dalam menjelaskan tujuan riset kepada komunitas.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Sejarah Migrasi Nelayan Buton ke Pulau Derawan

Migrasi nelayan Buton ke wilayah pesisir Kabupaten Berau, khususnya di Kecamatan Pulau Derawan, dimulai pada akhir dekade 1970-an hingga awal 1980-an. Gelombang pertama berlangsung secara sporadis, diawali oleh individu-individu yang mendengar kabar dari jalur informal mengenai potensi laut Berau yang masih melimpah, terutama dalam hal ketersediaan ikan pelagis, demersal, lobster, dan teripang. Pada masa yang sama, wilayah pesisir Buton sendiri mulai mengalami tekanan ekologi yang serius, penurunan hasil tangkapan, meningkatnya populasi nelayan, dan eksploitasi berlebih oleh penggunaan alat tangkap intensif, yang menciptakan kondisi krisis penghidupan di banyak kampung nelayan (Pelras, 2000; Kusnaka, 2010).

Salah satu informan kunci dalam penelitian ini, Basrin (67 tahun), menceritakan bahwa dia pertama kali menginjakkan kaki di Pulau Derawan pada tahun 1983. Dengan nada reflektif dia berkata, “Saya hanya bawa perahu, jaring, dan restu orang tua. Pertama tinggal di pondok kayu dekat pantai, malam-malam kadang kena angin besar, tapi kita jalani saja.”

Setelah menetap selama dua tahun dan menilai bahwa wilayah ini cukup menjanjikan, dia kemudian memanggil kerabat dekat serta teman seperjalanan dari kampung asal. Proses ini memperlihatkan pola migrasi bertahap (*stepwise migration*) dan berbasis jaringan sosial, bukan didorong oleh program transmigrasi negara atau skema relokasi formal. Hal ini sejalan dengan literatur migrasi internal yang menekankan bahwa migrasi nelayan sering berlangsung secara informal, berbasis inisiatif komunitas, dan bergantung pada modal sosial berbasis etnis (Hugo, 1995; Eder, 2009).

Dalam kerangka teori migrasi yang dikembangkan oleh Everett S. Lee (1966), dinamika ini memperlihatkan pertemuan antara *push factors* dan *pull factors* yang khas. Faktor pendorong dari Buton meliputi degradasi sumber daya laut, persaingan tinggi antar-nelayan, dan tekanan populasi. Sedangkan faktor penarik dari Kalimantan Timur mencakup perairan yang masih produktif, pasar yang belum jenuh, ketiadaan zonasi ketat, serta peluang membangun kehidupan baru secara lebih otonom.

Namun lebih dari sekadar kalkulasi rasional, migrasi ini juga dibentuk oleh dimensi sosial-budaya. Keberadaan anggota keluarga atau kerabat yang lebih dulu menetap

menjadi semacam penyangga sosial bagi migran baru. Seperti disampaikan oleh Ayong (53 tahun), yang datang pada tahun 1987, “Kami ikut jejak saudara, karena tahu di sini masih banyak ikan. Di kampung, makin susah. Tapi yang paling penting, sudah ada orang Buton duluan yang bisa tempat bertanya.”

Pola ini memperlihatkan karakter migrasi komunitas (communal migration), di mana individu tidak hanya membawa dirinya secara fisik, tetapi juga nilai budaya, pengetahuan lokal, dan struktur sosial komunitas. Dalam konteks nelayan Buton, migrasi disertai dengan pembentukan kantong-kantong komunitas etnis, yang mereproduksi relasi sosial seperti sistem kerja punggawa–sawi, penggunaan bahasa daerah, serta pelaksanaan ritual adat dan keagamaan. Ini sejalan dengan analisis Barth (1969) bahwa identitas etnis bukan sesuatu yang statis, melainkan terus dinegosiasikan melalui interaksi dengan kelompok lain dalam struktur sosial baru.

Selain alasan ekonomi dan ekologis, terdapat pula motivasi non-material yang turut mendorong migrasi. Dalam tradisi Buton, merantau atau “melaut ke daerah orang” adalah simbol kedewasaan dan kehormatan keluarga. Hal ini menjelaskan mengapa banyak laki-laki muda Buton memilih merantau ke wilayah-wilayah perikanan baru, bahkan ketika kondisi ekonominya belum pasti. Sebagaimana diungkapkan oleh La Udri (52 tahun), “Kalau di Buton, laki-laki belum merantau itu dianggap belum dewasa. Di sini kami buktikan bisa mandiri, bisa bangun keluarga, dan ajak saudara.”

Migrasi, dalam hal ini, menjadi bagian dari proyek identitas sekaligus strategi sosial. Dalam kurun waktu satu dekade, migrasi yang semula bersifat individual dan eksperimental mulai berkembang menjadi komunitas yang stabil secara sosial dan spasial, membentuk kampung nelayan dengan norma, struktur internal, dan pemimpin informal. Sebutan seperti “Kelompok Buton” mulai dikenal, meskipun belum memiliki status administratif resmi. Komunitas ini kemudian menjadi bagian dari lanskap sosial baru di Pulau Derawan, meskipun tetap membawa ketegangan dalam relasi antar-komunitas, terutama dalam hal akses terhadap ruang tangkap, keikutsertaan dalam struktur kampung, dan distribusi program bantuan.

Dengan demikian, sejarah migrasi nelayan Buton ke Pulau Derawan bukan hanya narasi perpindahan fisik, tetapi juga kisah tentang perluasan ruang sosial, pertarungan atas identitas, dan pembentukan komunitas dalam situasi yang tidak pasti. Menelusuri sejarah ini penting untuk memahami akar-akar pembentukan komunitas, strategi adaptasi, serta bagaimana nilai-nilai budaya dibawa, dijaga, dan ditransformasikan dalam konteks baru yang terus berubah.

## **2. Pola Pembentukan Komunitas dan Adaptasi Sosial Awal**

Setibanya di lokasi tujuan, para migran Buton tidak serta-merta membentuk pemukiman eksklusif atau enclave yang tertutup. Pada tahap awal kedatangan, mereka tinggal secara menyebar di rumah-rumah sewa milik nelayan lokal atau membangun pondok-pondok sederhana di sepanjang garis pantai. Hunian sementara ini bersifat fungsional dan adaptif, mencerminkan orientasi awal mereka yang belum sepenuhnya menetap. Interaksi sosial pada fase ini cenderung pragmatis dan berbasis kebutuhan bersama: saling membantu dalam aktivitas melaut, meminjam alat tangkap, berbagi tempat penyimpanan hasil laut, atau bertukar informasi pasar.

Salah seorang nelayan bernama Ansah (52 tahun), yang datang pada awal 1990-an mengisahkan, “Dulu belum ada rumah tetap. Kami sewa rumah orang Bajau, kadang bangun pondok sendiri pakai bambu. Waktu itu semua nelayan saling bantu, karena sama-

sama belum punya apa-apa.” Relasi awal ini menunjukkan pola integrasi yang lebih didasarkan pada fungsi ekonomi dan solidaritas kerja, dibandingkan dengan ikatan budaya yang eksklusif (Griffith, 2009; Fabinyi et al., 2014).

Seiring berjalannya waktu dan bertambahnya jumlah migran, mulai terbentuk struktur komunitas yang lebih stabil. Beberapa individu, terutama yang datang lebih awal atau memiliki pengalaman luas, secara informal mengambil peran sebagai tokoh rujukan. Mereka dikenal sebagai punggawa (pemimpin usaha penangkapan), imam salat Jumat, atau mediator antara komunitas Buton dan aparat kampung. Peran-peran ini tidak muncul dari struktur formal, melainkan dari legitimasi moral dan sosial, yang diberikan berdasarkan pengalaman, kedekatan kultural, dan kemampuan mengorganisasi kehidupan komunitas. Seperti disampaikan oleh Pak Sahrani (58 tahun), salah satu tokoh informal, “Bukan karena jabatan, tapi karena kita tahu siapa yang duluan datang, siapa yang bisa bicara baik, yang bisa bawa orang rukun. Kita dengar kalau dia yang bicara.”

Langkah awal menuju konsolidasi komunitas juga ditandai dengan pembangunan musala sederhana, pembentukan kelompok pengajian, dan perayaan hari besar Islam secara kolektif. Aktivitas ini berfungsi ganda: sebagai ekspresi religius dan sebagai klaim atas ruang simbolik dalam konteks sosial yang baru. Dalam beberapa tahun, komunitas Buton mulai membentuk zona pemukiman yang secara sosial diidentifikasi sebagai “Kelompok Buton,” meskipun belum memiliki pengakuan administratif. Penamaan ini muncul secara dua arah: dari dalam komunitas (internal naming) dan dari masyarakat lokal (external labelling), membentuk identitas kolektif yang dikenali dan diakui secara timbal balik (Cohen, 1985; Jenkins, 2008).

Proses ini memperlihatkan apa yang disebut Cohen (1985) sebagai pembentukan komunitas simbolik, yaitu komunitas yang dibentuk bukan hanya oleh kedekatan spasial, tetapi juga oleh sistem makna, simbol, dan praktik sosial yang dibagi bersama. Identitas ke-Buton-an tidak sekadar terwujud dalam bahasa dan asal-usul, tetapi juga melalui sistem kerja kolektif, pembagian hasil tangkap, tata krama sosial, serta nilai binci-binciki kuli, yang menekankan harmoni, rasa malu, dan saling menghormati sebagai prinsip dasar hubungan antarindividu. Nilai ini menjadi etika sosial internal dan juga mekanisme disiplin tak tertulis yang mengatur perilaku kolektif.

Namun, pembentukan komunitas ini tidak steril dari ketegangan sosial. Meski tidak terjadi konflik terbuka, terdapat segregasi sosial ringan. Komunitas Buton cenderung membentuk ikatan internal yang kuat, dan berinteraksi secara terbatas di luar kegiatan ekonomi atau keagamaan. Sebagaimana diungkapkan oleh seorang warga lokal, “Orang Buton baik, tapi lebih sering kumpul dengan sesamanya. Kalau ada acara kampung, kadang ikut, kadang tidak.” Di sisi lain, warga Buton juga menyadari adanya batas-batas sosial yang tidak mudah ditembus, terutama dalam urusan politik kampung atau akses terhadap sumber daya administratif.

Fenomena ini mencerminkan argumen klasik Fredrik Barth (1969) bahwa batas etnis tidak dibentuk oleh perbedaan substansi budaya, melainkan oleh interaksi sosial yang menghasilkan persepsi “kami” dan “mereka.” Dalam ruang sosial yang dinamis, batas-batas ini dibentuk, dinegosiasikan, dan kadang diperkuat sebagai strategi identitas dan pertahanan sosial, khususnya ketika komunitas berada dalam posisi minoritas atau pendatang.

Dengan demikian, proses pembentukan komunitas Buton, meski terbatas secara spasial dan politik, telah membentuk fondasi penting bagi daya tahan sosial mereka. Keberadaan simbol, nilai, dan institusi informal memberi mereka kapasitas untuk bertahan

dan menavigasi dinamika perubahan tanpa kehilangan akar identitas. Dalam masyarakat pesisir yang multi-etnis dan terus berubah, pola ini menunjukkan bagaimana komunitas migran mampu menyusun ulang keterikatan sosial di tempat baru tanpa tercerabut dari nilai-nilai budaya asal (Silver, 2011; Appadurai, 1996).

### 3. Peran Modal Budaya dalam Proses Adaptasi dan Kohesi

Salah satu kekuatan utama komunitas migran Buton dalam proses pembentukan komunitas dan penyesuaian terhadap lingkungan baru adalah modal budaya yang mereka bawa dari daerah asal. Modal budaya ini mencakup pengetahuan teknis terkait aktivitas kelautan, sistem nilai kolektif, struktur sosial informal, praktik religius, serta cara-cara khas dalam mengelola kehidupan sosial. Dalam kerangka teori Pierre Bourdieu (1986), modal budaya berfungsi sebagai sumber daya simbolik yang memungkinkan aktor sosial menavigasi medan sosial baru dengan mengandalkan kebiasaan, nilai, dan disposisi yang dibentuk sejak di kampung halaman.

Sebagaimana dijelaskan oleh Pak La Umar (54 tahun), seorang ketua kelompok nelayan yang datang pada pertengahan 1990-an, “Kalau bukan karena nilai-nilai seperti saling bantu, kerja sama, dan kepercayaan, mungkin kita sudah bubar dari dulu. Di sini kita tidak punya siapa-siapa waktu datang. Yang membuat kita bisa bertahan adalah kebiasaan kita sendiri.” Pernyataan ini menggambarkan bahwa dalam ketiadaan infrastruktur sosial formal, nilai budaya berfungsi sebagai jangkar adaptasi, membentuk rasa aman dan kebersamaan di tengah ketidakpastian.

Salah satu bentuk modal budaya yang paling menonjol adalah sistem kerja *punggawa-sawi*, yakni relasi kerja antara pemilik alat dan buruh nelayan yang bersifat fleksibel dan tidak terlalu hirarkis. Sistem ini memungkinkan pembagian kerja dan distribusi hasil tangkap berdasarkan kepercayaan, kedekatan emosional, dan pertimbangan moral. Seorang nelayan muda, La Salli (36 tahun), menuturkan, “Kami ikut bos bukan karena gaji tetap, tapi karena tahu dia adil. Dia yang lebih tua dan punya alat, tapi hasil tetap dibagi sesuai kerja. Kalau sakit, dia bantu. Kalau cuaca buruk, dia yang urus.” Relasi ini menunjukkan bahwa kerja dalam komunitas migran bukan hanya kontrak ekonomi, tetapi juga relasi sosial yang penuh nilai dan tanggung jawab kolektif (Adhuri, 2013; Eder, 2009).

Selain relasi kerja, penguasaan ruang laut juga dilakukan secara informal melalui kesepakatan lisan dan pengakuan antar-nelayan. Dalam banyak kasus, wilayah tangkap tidak ditentukan oleh klaim formal atau batas administratif, tetapi oleh logika kepercayaan dan pengalaman lokal. Ini menunjukkan bagaimana komunitas membangun *governance from below*, yakni bentuk tata kelola berbasis etika komunitas yang tetap efektif meskipun berada di luar struktur hukum formal (Scott, 1998; Ostrom, 2000).

Tokoh agama memegang peran penting dalam menjaga kohesi sosial komunitas. Tidak hanya sebagai pemimpin spiritual, mereka juga berfungsi sebagai penengah konflik dan penghubung informal dengan masyarakat lokal. Seperti dijelaskan oleh Ibu Hj. Nuramiyah (52 tahun), pengurus majelis taklim Kelompok Buton, “Kalau ada masalah, entah anak muda ribut, atau soal lahan tempat jemur ikan, kami tidak langsung ke RT. Biasanya ke ustaz dulu, supaya adem. Baru kalau perlu, ustaz bicara ke orang kampung.” Kehadiran tokoh agama mencerminkan otoritas simbolik yang dilegitimasi secara kultural dan spiritual, dan karenanya lebih mudah diterima oleh semua lapisan komunitas (Geertz, 1960; Acciaoli, 2001).

Nilai-nilai seperti hemat, gotong royong, saling bantu, dan semangat padoma (kerja kolektif) menjadi fondasi budaya dalam membangun komunitas. Nilai-nilai ini menjadi mekanisme adaptif yang memungkinkan komunitas bertahan dalam kondisi ekonomi dan ekologis yang tidak pasti. Dalam wawancara kelompok dengan ibu-ibu nelayan, Ibu Elmin (45 tahun) menyampaikan, “Kami biasa bantu-bantu bikin abon, masak bareng untuk pengajian, atau kumpul uang buat beli freezer. Semua itu bukan karena disuruh, tapi karena sudah terbiasa di kampung dulu. Di sini kami coba teruskan.” Nilai-nilai ini bukan sekadar tradisi, tetapi strategi bertahan hidup dan pembangunan solidaritas horizontal, terutama di tengah minimnya intervensi negara (Cleaver, 2005; Berkes & Ross, 2013).

Seiring berjalannya waktu, bentuk kohesi internal ini membuka jalan bagi integrasi sosial secara selektif dengan komunitas lokal. Beberapa warga Buton terlibat dalam kegiatan kemasyarakatan lintas etnis, seperti pengajian kampung, gotong royong pembangunan masjid, dan perayaan nasional seperti 17 Agustus. Seorang pemuda lokal Buton, Hasan (47 tahun), menjelaskan, “Kami tetap jaga adat Buton, tapi juga ikut kalau orang kampung undang. Kita bantu bersih masjid, angkat pasir, atau ikut lomba. Supaya kita juga dihargai, bukan cuma numpang laut saja.” Pernyataan ini menegaskan bahwa integrasi sosial tidak identik dengan asimilasi, melainkan strategi negosiasi yang memungkinkan mereka tetap menjaga identitas budaya sambil membangun pengakuan dan ruang sosial di tengah masyarakat multietnis.

Dengan demikian, modal budaya memainkan peran ganda dalam proses adaptasi dan pembentukan komunitas nelayan migran Buton. Di satu sisi, modal budaya menjadi alat mempertahankan identitas dan solidaritas internal, sedangkan di sisi lain berfungsi sebagai media negosiasi sosial dalam menghadapi struktur eksternal yang seringkali eksklusif. Dalam konteks migrasi pesisir yang sarat tantangan, modal budaya berperan sebagai sumber daya resilien, memungkinkan komunitas membentuk tatanan sosial yang berdaya dan lentur terhadap perubahan.

#### **4. Kendala Struktural dan Ketimpangan Akses**

Meskipun komunitas migran Buton di Pulau Derawan berhasil membentuk struktur sosial yang relatif solid dan menunjukkan kohesi internal yang kuat, mereka tetap menghadapi berbagai kendala struktural dalam mengakses sumber daya, pengakuan kelembagaan, serta partisipasi dalam sistem pengambilan keputusan lokal. Dalam istilah Tania Li (1999), komunitas semacam ini berada dalam posisi “socio-spatial marginality,” yakni eksis secara sosial, namun tidak sepenuhnya diakui secara politik atau administratif.

Salah satu persoalan utama yang dihadapi adalah ketidakjelasan status kepemilikan lahan. Sejumlah keluarga nelayan Buton masih menempati tanah secara informal, melalui perjanjian lisan dengan pemilik lokal, atau sekadar “ikut tinggal” di sekitar kawasan pesisir yang belum terzonasi. Kondisi ini menciptakan kerentanan hukum terhadap penggusuran, sengketa lahan, atau konflik dengan warga asli dan pengusaha swasta, terutama ketika wilayah pesisir mulai masuk dalam proyek-proyek pembangunan wisata atau konservasi.

Dalam wawancara dengan Pak La Amir (80 tahun), salah seorang yang dituakan dan tinggal di pesisir Pulau Derawan sejak 1971, mengungkapkan, “Kami tinggal di sini sudah lama, bangun sendiri, tapi surat tidak ada. Dulu hanya bilang baik-baik ke orang tua pemilik lahan. Tapi sekarang kalau datang investor, kita takut digusur.” Ketiadaan legalitas ini membuat mereka tidak hanya rentan secara fisik, tetapi juga sulit untuk mengakses layanan dasar seperti listrik permanen, sambungan air bersih, atau bantuan renovasi rumah dari pemerintah daerah. Beberapa warga melaporkan bahwa akses

terhadap program bantuan pemerintah sangat terbatas, karena status administratif mereka yang masih dianggap sebagai “pendatang sementara”, atau belum tercatat secara sah sebagai warga kampung.

Dari sisi kelembagaan, komunitas Buton kerap luput dari perhatian program pemberdayaan resmi seperti kelompok nelayan binaan, pelatihan budidaya laut, atau skema bantuan permodalan. Dalam banyak kasus, program-program semacam ini disalurkan melalui struktur kelembagaan kampung yang tidak sepenuhnya mengakomodasi keberadaan komunitas migran. Beberapa tokoh masyarakat menyebut bahwa proses distribusi bantuan kerap menggunakan logika patronase lokal, di mana aktor yang memiliki kedekatan politik atau kedudukan formal lebih diutamakan.

Hasan (47 tahun), tokoh pemuda yang juga aktif dalam musyawarah kampung, menyampaikan, “Kami sering dengar ada bantuan nelayan, tapi saat tanya ke RT atau kepala kampung, jawabannya belum bisa karena kami dianggap bukan warga asli sini. Padahal kami sudah tinggal lebih dari 20 tahun.” Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun komunitas migran mampu membangun kehidupan sosial dan ekonomi secara mandiri, keberdayaan mereka tetap dibatasi oleh struktur formal yang mengatur distribusi hak dan sumber daya. Ini menegaskan bahwa pembentukan komunitas tidak serta-merta menjamin inklusi struktural, terutama dalam konteks di mana pengakuan formal menjadi prasyarat akses terhadap hak-hak warga negara (Fraser, 2001).

Dalam banyak hal, posisi komunitas Buton merefleksikan dinamika ketimpangan dalam tata kelola lokal, di mana akses terhadap layanan publik, program pemerintah, dan pengambilan keputusan masih bersifat eksklusif dan terfragmentasi secara etnis maupun administratif. Ketika program pembangunan dirancang tanpa mempertimbangkan keragaman sosial dan sejarah migrasi lokal, maka komunitas semacam ini akan terus mengalami eksklusi meskipun telah berkontribusi besar terhadap ekonomi lokal, khususnya sektor perikanan.

Dengan demikian, kendala struktural yang dihadapi komunitas Buton bukan hanya akibat dari ketiadaan legalitas formal, tetapi juga berkaitan dengan relasi kuasa yang mewujud dalam praktik administratif dan politik lokal. Hal ini menegaskan perlunya pendekatan pemberdayaan yang tidak hanya berbasis proyek, tetapi juga berbasis pengakuan (*recognition*), redistribusi akses (*redistribution*), dan reformasi kelembagaan yang lebih inklusif terhadap komunitas migran.

## 5. Diskusi Teoritis

Proses migrasi dan pembentukan komunitas nelayan Buton di Pulau Derawan menunjukkan bahwa migrasi internal dalam konteks pesisir tidak dapat dipahami semata sebagai mobilitas ekonomi, melainkan sebagai proses sosial yang kompleks, melibatkan transformasi identitas, relasi kuasa, dan konstruksi ruang sosial baru. Dalam hal ini, migrasi berfungsi ganda: sebagai strategi bertahan hidup sekaligus sebagai upaya rekonstruksi kehidupan kolektif dalam lanskap yang belum sepenuhnya dikenal dan dikuasai oleh migran (Glick Schiller et al., 1992; Li, 1999).

Temuan lapangan memperlihatkan bahwa komunitas Buton tidak hanya membawa tubuh dan tenaga kerja mereka ke wilayah baru, tetapi juga memobilisasi modal budaya, seperti nilai-nilai kerja kolektif (*padoma*), sistem punggawa–sawi, otoritas keagamaan, dan norma sosial khas Buton. Modal budaya ini menjadi mekanisme adaptif sekaligus alat negosiasi simbolik, memungkinkan mereka membangun solidaritas internal,

mempertahankan identitas etnis, dan menciptakan struktur sosial alternatif di luar sistem formal yang dominan (Bourdieu, 1986; Cleaver, 2005).

Namun demikian, dalam ruang sosial yang baru ini, posisi komunitas migran bersifat ambigu dan ambivalen. Di satu sisi, mereka berperan sebagai aktor ekonomi produktif yang menyumbang pada sektor perikanan lokal, bahkan sering kali mengisi kekosongan tenaga kerja di sektor yang ditinggalkan oleh masyarakat lokal. Di sisi lain, mereka tetap menghadapi batas-batas simbolik dan struktural, berupa status administratif yang tidak sah, ketiadaan legalitas tanah, dan eksklusi dari program-program pemberdayaan yang dirancang secara top-down dan tidak responsif terhadap keragaman sosial lokal (Fraser, 2001; Adhuri, 2013).

Situasi ini mencerminkan apa yang disebut oleh Nancy Fraser sebagai ketidakadilan ganda, yaitu eksklusi dalam bentuk ketimpangan distribusi sumber daya ekonomi dan pengingkaran atas hak pengakuan identitas. Dengan kata lain, komunitas Buton mengalami keterpinggiran tidak hanya karena miskin, tetapi juga karena mereka tidak dianggap sebagai bagian “resmi” dari masyarakat local, sebuah bentuk eksistensi sosial tanpa legitimasi struktural.

Lebih lanjut, proses migrasi Buton memperlihatkan bahwa pembentukan komunitas migran bukan hanya persoalan agregasi fisik populasi, melainkan juga tentang produksi ruang sosial (Lefebvre, 1991). Kelompok Buton yang terbentuk secara bertahap di Pulau Derawan merupakan hasil dari serangkaian praktik spasial, simbolik, dan politik yang dilakukan oleh aktor-aktor migran dalam menavigasi medan sosial yang baru. Ruang ini bukan hanya tempat tinggal, tetapi juga ruang simbolik yang memuat nilai-nilai, sejarah migrasi, dan batas-batas sosial yang dinegosiasikan sehari-hari.

Konsep ruang sebagai hasil relasi sosial menjadi penting di sini. Keberadaan Kelompok Buton bukan hanya akibat dari perpindahan geografis, tetapi juga hasil dari perlawanan kultural terhadap invisibilitas sosial dan ekonomi. Dalam konteks ini, komunitas migran menciptakan “ruang alternatif”, yang di dalamnya mereka bisa bertahan, membangun solidaritas, dan merumuskan keberdayaan dalam bentuknya yang khas, meskipun secara legal mereka tetap berada di tepi struktur formal (Gupta & Ferguson, 1992).

Dengan demikian, membaca migrasi dalam konteks pesisir menuntut pendekatan yang melampaui paradigma ekonomi atau demografi. Dibutuhkan kerangka yang memahami migrasi sebagai proses sosial-kultural yang berkelindan dengan relasi kuasa, praktik spasial, dan dinamika simbolik. Studi ini menunjukkan bahwa keberdayaan komunitas migran tidak hanya ditentukan oleh kapasitas teknis atau jumlah aset, tetapi juga oleh sejauh mana mereka mampu mengartikulasikan identitas, memperkuat solidaritas internal, dan menavigasi batas-batas sosial yang mereka hadapi.

## **KESIMPULAN**

Migrasi nelayan Buton ke Kecamatan Pulau Derawan merepresentasikan strategi historis dan kultural yang dijalankan oleh komunitas maritim dalam merespons tekanan ekologis, sosial, dan ekonomi di wilayah asal. Proses ini tidak berlangsung secara linear atau homogen, melainkan muncul sebagai migrasi bertahap (stepwise migration) yang berbasis pada jaringan sosial dan nilai-nilai budaya yang hidup dalam tradisi perantauan masyarakat Buton.

Motivasi di balik migrasi ini tidak semata-mata bersifat ekonomis, tetapi juga berkaitan dengan norma sosial tentang kedewasaan laki-laki, kehormatan keluarga, dan

pencarian ruang hidup yang lebih otonom. Nilai-nilai seperti semangat merantau, kerja kolektif, dan loyalitas kultural menjadi pendorong utama yang memperkuat ketahanan sosial dalam menghadapi medan sosial baru yang belum sepenuhnya ramah.

Setibanya di lokasi tujuan, komunitas Buton tidak membangun enclave eksklusif, tetapi secara bertahap membentuk konfigurasi sosial yang khas. Dimulai dari interaksi fungsional yang pragmatis, mereka kemudian mengembangkan struktur komunitas dengan sistem nilai internal seperti binci-binciki kuli, sistem kerja punggawa–sawi, serta otoritas informal berbasis agama dan pengalaman migrasi. Proses ini mencerminkan pembentukan komunitas simbolik, di mana ruang sosial tidak hanya dimaknai secara fisik, tetapi juga sebagai ekspresi identitas dan solidaritas etnis.

Modal budaya menjadi faktor penentu dalam proses ini. Pengetahuan lokal, tata nilai, dan praktik sosial dari kampung asal bertransformasi menjadi mekanisme adaptasi dan reproduksi sosial di wilayah tujuan. Meskipun terbentuk dalam kondisi minim dukungan formal, komunitas ini mampu menciptakan kohesi internal yang kuat, dan dalam banyak kasus menunjukkan kemampuan integrasi selektif dengan masyarakat lokal. Namun demikian, batas-batas simbolik tetap hadir, dan segregasi sosial ringan menjadi bagian dari dinamika sehari-hari.

Kendati berhasil membangun komunitas yang fungsional dan resilien, tantangan struktural tetap membayangi. Keterbatasan akses terhadap legalitas lahan, program pemberdayaan formal, dan fasilitas publik menciptakan ketimpangan posisi komunitas Buton dalam struktur pemerintahan lokal. Mereka tetap dianggap sebagai “pendatang”, sehingga eksistensi sosial tidak selalu sejalan dengan pengakuan administratif. Hal ini menunjukkan bahwa pembentukan komunitas migran tidak serta-merta menjamin inklusi dalam struktur kekuasaan lokal, kecuali diikuti oleh transformasi kelembagaan yang lebih responsif dan inklusif.

Dengan demikian, dinamika migrasi dan pembentukan komunitas nelayan Buton di Pulau Derawan mencerminkan proses adaptasi sosial yang kompleks dan berlapis. Di dalamnya, identitas, solidaritas, dan relasi kuasa menjadi elemen kunci yang menentukan keberlanjutan komunitas migran pesisir. Temuan ini menegaskan bahwa migrasi bukan sekadar mobilitas ekonomi, tetapi juga merupakan proses produksi ruang sosial, negosiasi makna, dan perjuangan atas legitimasi dalam sistem sosial yang terus berubah. Untuk itu, membaca migrasi perlu dilakukan dalam bingkai relasi sosial, modal budaya, dan dinamika kelembagaan, bukan sekadar dalam kerangka angka dan arus perpindahan penduduk.

## DAFTAR REFERENSI

1. Acciaioli, G. (2001). Grounds of conflict, idioms of harmony: Custom, religion, and nationalism in violence avoidance at the Lindu Plain, Central Sulawesi. *Indonesia*, 72, 81–114.
2. Appadurai, A. (1996). *Modernity at Large: Cultural Dimensions of Globalization*. Minneapolis: University of Minnesota Press.
3. Barth, F. (1969). *Ethnic Groups and Boundaries: The Social Organization of Culture Difference*. Oslo: Universitetsforlaget.
4. Berkes, F., & Ross, H. (2013). Community resilience: Toward an integrated approach. *Society & Natural Resources*, 26(1), 5–20. <https://doi.org/10.1080/08941920.2012.736605>

5. Bourdieu, P. (1986). The forms of capital. In J. G. Richardson (Ed.), *Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education* (pp. 241–258). New York: Greenwood Press.
6. Boyd, M. (1989). Family and personal networks in international migration: Recent developments and new agendas. *International Migration Review*, 23(3), 638–670. <https://doi.org/10.1177/019791838902300303>
7. Cleaver, F. (2005). The inequality of social capital and the reproduction of chronic poverty. *World Development*, 33(6), 893–906. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2004.09.015>
8. Cohen, A. P. (1985). *The Symbolic Construction of Community*. London: Routledge.
9. Eder, J. F. (2009). Migrant labor and the politics of return: Filipino labor migration from Palawan Island. *Asian and Pacific Migration Journal*, 18(3), 303–329. <https://doi.org/10.1177/011719680901800303>
10. Fabinyi, M., Foale, S., & Macintyre, M. (2014). Managing inequality or managing stocks? An ethnographic perspective on the governance of small-scale fisheries. *Fish and Fisheries*, 16(3), 471–485. <https://doi.org/10.1111/faf.12069>
11. Fraser, N. (2001). Recognition without Ethics? *Theory, Culture & Society*, 18(2–3), 21–42.
12. Geertz, C. (1960). *The Religion of Java*. Chicago: University of Chicago Press.
13. Glick Schiller, N., Basch, L., & Szanton Blanc, C. (1992). *Towards a Transnational Perspective on Migration: Race, Class, Ethnicity, and Nationalism Reconsidered*. New York: New York Academy of Sciences.
14. Griffith, D. (2009). The ecological anthropology of marine extraction: Ten years of research in fisheries in Latin America and the Caribbean. *Latin American Research Review*, 44(3), 138–154.
15. Gupta, A., & Ferguson, J. (1992). Beyond “Culture”: Space, identity, and the politics of difference. *Cultural Anthropology*, 7(1), 6–23. <https://doi.org/10.1525/can.1992.7.1.02a00020>
16. Hugo, G. (1995). The economy and Indonesian internal migration. In T. H. T. Dang & L. Duc (Eds.), *Population Mobility in Developing Countries* (pp. 74–108). London: Routledge.
17. Jenkins, R. (2008). *Social Identity* (3rd ed.). London: Routledge.
18. Kusnaka, A. (2010). Eksploitasi sumber daya perikanan dan transformasi sosial di komunitas nelayan. *Masyarakat: Jurnal Sosiologi*, 15(2), 123–144.
19. Lee, E. S. (1966). A theory of migration. *Demography*, 3(1), 47–57. <https://doi.org/10.2307/2060063>
20. Lefebvre, H. (1991). *The Production of Space*. (D. Nicholson-Smith, Trans.). Oxford: Blackwell.
21. Li, T. M. (1999). Marginality, power and production: Analysing upland transformations. *Development and Change*, 30(3), 611–639. <https://doi.org/10.1111/1467-7660.00131>
22. Massey, D. S., Arango, J., Hugo, G., Kouaouci, A., Pellegrino, A., & Taylor, J. E. (1993). Theories of international migration: A review and appraisal. *Population and Development Review*, 19(3), 431–466. <https://doi.org/10.2307/2938462>
23. Pelras, C. (2000). Transformation of the Bugis-Makassar: Selective modernization and identity maintenance. In R. W. Hefner (Ed.), *The Politics of Multiculturalism*:

- Pluralism and Citizenship in Malaysia, Singapore, and Indonesia (pp. 232–262). Honolulu: University of Hawai'i Press.
24. Scott, J. C. (1998). *Seeing Like a State: How Certain Schemes to Improve the Human Condition Have Failed*. New Haven: Yale University Press.
  25. Silver, A. (2011). *Communities of Strangers: Edge Ethnographies and the Making of Belonging*. Oxford: Oxford University Press.